

MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT
HASIL SURVEI PERSEPSI KORUPSI
TRIWULAN I (JULI - SEPTEMBER) TAHUN 2025

I. MONITORING

Berdasarkan laporan Survei Persepsi Korupsi Triwulan III Tahun 2025 (terlampir) yang memuat telah dilakukannya hasil survei terhadap responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sibolga diperoleh nilai rata-rata per indikator sebagai berikut:

| No. | Indikator | Nilai |
|-----|------------------------|-------|
| 1. | Manipulasi Peraturan | 4.00 |
| 2. | Penyalahgunaan Jabatan | 3.90 |
| 3. | Menjual Pengaruh | 4.00 |
| 4. | Transaksi Biaya | 4.00 |
| 5. | Biaya Tambahan | 4.00 |
| 6. | Hadiah | 4.00 |
| 7. | Transparansi Biaya | 4.00 |
| 8. | Percaloan | 4.00 |
| 9. | Perbuatan Curang | 4.00 |
| 10. | Transaksi Rahasia | 4.00 |

II. EVALUASI

Berdasarkan laporan Survei Persepsi Korupsi Triwulan III Tahun 2025 (terlampir) yang memuat telah dilakukannya hasil survei terhadap responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sibolga diperoleh nilai **Indeks Persepsi Korupsi** yaitu **4,00** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.

Jumlah responden pada Triwulan III Tahun 2025 ini sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) responden.

Merujuk berdasarkan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Sibolga Triwulan III Tahun 2025 tersebut di atas memenuhi nilai 160 yang merupakan nilai maksimal, sehingga seluruh unsur memenuhi nilai unsur tertinggi dan terendah dengan nilai yang sama yaitu sebagai berikut:

EVALUASI NILAI UNSUR

2 Unsur Terendah

3 Unsur Tertinggi

| No. | Unsur | Nilai |
|-----|--|-------|
| 1 | Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? | 500 |
| 2 | Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ? | 500 |
| 3 | Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? | 500 |

Selain tiga indikator yang memiliki nilai indeks tertinggi, dalam survei ini juga terdapat tiga indikator yang memiliki nilai terendah dari sepuluh indikator lainnya, yakni

| No. | Unsur | Nilai |
|-----|--|-------|
| 1 | Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ? | 499 |
| 2 | Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? | 500 |
| 3 | Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ? | 500 |

Yang perlu ditingkatkan agar dalam survei yang akan datang memiliki nilai indeks yang tinggi.

III. TINDAK LANJUT

Dari hasil Survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan pada Triwulan III Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) indikator atau ruang lingkup yang memiliki nilai rata-rata terendah yakni Penyalahgunaan Jabatan, Manipulasi Peraturan, dan Menjual Pengaruh.

Meskipun hasil survei tersebut berulang sebagaimana dalam survei triwulan III, namun Pengadilan Negeri Sibolga telah berupaya melakukan peningkatan dan pembenahan untuk memperbaiki indikasi tersebut direkomendasikan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam survei persepsi anti korupsi pertanyaan indikator ini yaitu "*apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk menerima imbalan tertentu?*"

Rekomendasi tindak lanjutnya adalah telah dilakukan penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama oleh seluruh aparatur Pengadilan Negeri Sibolga. Kemudian selalu diingatkan dalam rapat bulanan kepada seluruh aparatur Pengadilan Negeri Sibolga untuk tidak melakukan penyalahgunaan jabatan dalam bentuk apapun.

2. Manipulasi Peraturan

Dalam survei persepsi anti korupsi pertanyaan indikator ini yaitu *“apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?”*

Rekomendasi tindak lanjutnya adalah bilamana adanya kekurangpahaman pengguna layanan terkait sistem, mekanisme, dan prosedur layanan seringkali menimbulkan stigma pelayanan pada Pengadilan terkesan berbelit-belit maka perlu dilakukan peningkatan publikasi SOP pelayanan pada Pengadilan baik melalui media sosial, *website*, maupun informasi langsung yang diberikan oleh petugas layanan yang dengan selalu menerapkan 3S (Senyum, Sapa, Salam) hingga pengguna layanan merasa lebih nyaman dan mengerti akan prosedur yang ada sesuai ketentuan yang berlaku.

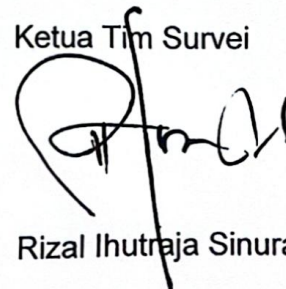
3. Menjual Pengaruh

Dalam survei persepsi anti korupsi pertanyaan indikator ini yaitu *“pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?”*

Rekomendasi tindak lanjutnya adalah telah dilakukan penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama oleh seluruh aparatur Pengadilan Negeri Sibolga. Kemudian selalu diingatkan dalam rapat bulanan kepada seluruh aparatur Pengadilan Negeri Sibolga untuk tidak melakukan menjual pengaruh dalam bentuk apapun. Kemudian agar memastikan bahwa seluruh layanan yang telah diberikan kepada pengguna layanan sudah sesuai dengan SOP dan standar layanan yang telah ditentukan.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan informasi bagi pimpinan untuk upaya peningkatan kualitas pelayanan publik demi terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Sibolga.

Ketua Tim Survei



Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.